PENGARUH KEGIATAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KAYU AGUNG

Skripsi Oleh:

PINKA INDANESIA
NIM.01081003070

Untuk Memenuhi Sebagian dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2012

S
336.2407
Pin
P
2012
24207 / 24757

PENGARUH KEGIATAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA KAYU AGUNG

UPT PERPUSTAKAAN

Skripsi Oleh:

PINKA INDANESIA
NIM.01081003070

Untuk Memenuhi Sebagian dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
Tahun 2012

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PENGARUH KEGIATAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KAYU AGUNG

Disusun Oleh:

Nama	: Pinka Indanesia
NIM	: 01081003070
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 Juli 2012

Ketua:_____
Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E, M.M, Ak.
NIP : 196503111992032002

Tanggal : 26 Juli 2012

Anggota:_____
Dewi Rina Komarawati, S.E, M.M, Ak.
NIP : 19620913994032001

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF

PENGARUH KEGIATAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KAYU AGUNG

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa	: Pinka Indanesia
NIM	: 01081003070
Fakultas	: Ekonomi
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi	: Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 25 Juli 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 26 Juli 2012

Ketua	Anggota	Anggota
Hj. Rina Tjandrakirana DP,S.E,M.M,Ak	Dewi Rina K. S.E,M.M,Ak	Eka Meirawati. S.E,Ak,M.Si
NIP. 196503111992032002	NIP. 196209139940320 01	NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Ahmad Subeki S.E. Ak. M.M.
NIP. 196508161995121001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Imagination is more important than knowledge (Albert Einstein)

If you're not confused, you're not paying attention (Tom Peters)

Love all, trust a few (William Shakespeare)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:.

- *Allah SWT*
- *Keluargaku*
- *Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Kayu Agung**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kayu Agung. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, dan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan
3. Sekretaris Jurusan
4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya, 26 Juli 2012

Penulis

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR 122101
TANGGAL 29 OCT 2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF..... iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
DAFTAR ISI..... vi
DAFTAR TABEL..... xi
DAFTAR GAMBAR..... xii
DAFTAR LAMPIRAN..... xiii
ABSTRAKSI..... xiv
ABSTRACT..... xv
PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH..... xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah..... 6
1.3. Tujuan Penelitian..... 6
1.4. Manfaat Penelitian..... 7
1.5. Sistematika Penulisan..... 8
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Ekstensifikasi..... 9
2.1.1 Pengertian Ekstensifikasi..... 9
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Ekstensifikasi..... 10
2.1.3 Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan..... 10
2.1.4 Unit Organisasi dan Petugas Pelaksana Kegiatan Ekstensifikasi.. 12
2.1.5 Data dan pencarian data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Ekstensifikasi..... 13
2.1.6 Tata cara pelaksaan kegiatan ekstensifikasi..... 16

2.1.6.1 Persiapan kegiatan ekstensifikasi..... 16

2.1.6.2 Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi..... 17

2.1.6.3 Pengawasan..... 20

2.2 Wajib Pajak..... 21

2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak..... 23

2.3.1 Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)..... 23

2.3.2 Dasar Hukum NPWP..... 23

2.3.3 Fungsi NPWP..... 24

2.3.4 Jangka Waktu dan Tempat Pendaftaran NPWP..... 25

2.3.5 Tata Cara Pendaftaran NPWP..... 26

2.3.6 Sanksi yang Berhubungan Dengan NPWP..... 29

2.4 Surat Pemberitahuan..... 31

2.4.1 Pengertian Surat Pemberitahuan..... 31

2.4.2 Fungsi Surat Pemberitahuan..... 31

2.4.3 Jenis Surat Pemberitahuan..... 32

2.4.4 Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan..... 33

2.4.5 Sanksi Berkaitan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan 34

2.5 Pajak Penghasilan Orang Pribadi..... 35

2.5.1 Subjek Pajak Orang Pribadi..... 35

2.5.2 Non Subjek Pajak Orang Pribadi..... 36

2.5.3 Penghasilan Orang Pribadi..... 37

2.6 Tinjauan Penelitian Sebelumnya..... 42

2.7 Kerangka Pemikiran..... 44

2.8 Hipotesis..... 46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian..... 48

3.2 Jenis Penelitian..... 48

3.3 Jenis dan Sumber Data..... 49

3.4 Metode Pengumpulan Data..... 49

3.5 Variabel Penelitian..... 50

3.6 Metode Analisis Data..... 51

3.7 Tehnik Analisi Data..... 51

3.8 Data Penelitian..... 52

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Penelitian..... 55

4.1.1 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung..... 55

4.1.2 Perkembangan Jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung..... 56

4.1.3 Perkembangan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung..... 57

4.1.4 Statistik Deskriptif..... 58

4.1.5 Uji Korelasi Spearman Rank..... 59

4.1.5.1 Korelasi antara Pertambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi... 60

4.1.5.2 Korelasi Antara Pertambahan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi..... 61

4.2 Pembahasan..... 62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan..... 72

5.2 Saran..... 73

5.3 Keterbatasan..... 74

Daftar Pustaka..... 75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pertambahannya dari Tahun 2003 s/d 2010 di KPP Pratama Kayu Agung....	53
Tabel 3.2	Jumlah Wajib Pajak OP yang Menyampaikan SPT Tahunan dari Tahun 2003 s/d 2010 di KPP Pratama Kayu Agung.....	53
Tabel 3.3	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari Tahun 2003 s/d 2010 di KPP Pratama Kayu Agung.....	54
Tabel 4.1	Perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi dari Tahun 2003 s/d 2010 di KPP Pratama Kayu Agung.....	55
Tabel 4.2	Perkembangan Wajib Pajak OP yang Menyampaikan SPT Tahunan dari Tahun 2003 s/d 2010 di KPP Pratama Kayu Agung.....	57
Tabel 4.3	Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari Tahun 2003 s/d 2010 di KPP Pratama Kayu Agung.....	58
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif Penelitian.....	59
Tabel 4.5	Korelasi Spearman Rank antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	60
Tabel 4.6	Korelasi Spearman Rank antara Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	61
Tabel 4.7	Rata-rata Kenaikan NPWP Orang Pribadi, SPT Tahunan Orang Pribadi dan Penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2003 s/d 2010.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1Penerimaan Pajak Tahun 2001-2011 3

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran Penelitian 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data dari KPP Pratama Kayu Agung.....	77
Lampiran 2	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	87
Lampiran 3	Agenda Konsultasi Skripsi.....	92
Lampiran 4	Surat Riset/Penelitian.....	96

ABSTRAK

Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kayu Agung

Oleh :

Pinka Indanesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan ekstensifikasi berupa pertambahan NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah NPWP, jumlah SPT Tahunan orang pribadi dan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari KPP Pratama Kayu Agung dari tahun 2003 sampai dengan 2010. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi spearman rank.

Berdasarkan analisis korelasi spearman rank, hasil yang didapatkan menunjukan bahwa pertambahan NPWP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa selama tahun 2003 samapi dengan 2010, jumlah NPWP meningkat rata-rata sebesar 45,1% tiap tahun, jumlah SPT Tahunan orang pribadi meningkat rata-rata sebesar 45,1% tiap tahun dan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi meningkat rata-rata sebesar 65,4% tiap tahun.

Kata kunci : *Ekstensifikasi, Kepatuhan, Wajib Pajak, dan Pajak Penghasilan*

ABSTRACT

The Effect of Extensification Activities Toward The Private Taxpayer Compliance and Tax Revenue of Personal Income in KPP Pratama Kayu Agung

Oleh:
Pinka Indanesia; Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E, M.M, Ak; Dewi Rina Komarawati, S.E, M.M, Ak

This study aims to determine whether extending the activities of accretion NPWP affect taxpayer compliance and individual income tax receipts. In addition, this study aims to determine the development of NPWP number, the number of individual SPT and the amount of individual income tax receipts. This study uses secondary data from the KPP Pratama Kayu Agung from 2003 until 2010. A statistical method used in this study is the spearman rank correlation.

Based on the spearman rank correlation analysis, the results obtained show that the accretion NPWP does not have a significant influence on individual taxpayer compliance but has a significant effect on the individual income tax receipts. The results also show that during 2003 till about 2010, the number of NPWP increased on average by 45.1% per year, the number of individual SPT increased on average by 45.1% per year and the amount of individual income tax revenue increased average of 65.4% per year.

Key words: *Extensification, Compliance, Tax, and Income Tax*

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangang di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Pinka Indanesia
NIM	: 01081003070
Jurusan	: Akuntansi
Bidang Kajian	: Perpajakan
Fakultas	: Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul:

PENGARUH KEGIATAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KAYU AGUNG

Pembimbing:

Ketua	: Hj. Rina Tjandrakirana DP, S.E, M.M, Ak.
Anggota	: Dewi Rina Komarawati, S.E, M.M, Ak.
Tanggal Ujian	: 25 Juli 2012

adalah benar asli karya Saya Sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.
Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 26 Juli 2012
Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
F5319AAF948638
6000 DJP

Pinka Indanesia
NIM.01081003070

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam suatu negara, pembangunan adalah unsur yang penting agar negara mampu maju dan bersaing dengan negara lain. Untuk mewujudkan pembangunan itu, dibutuhkan biaya yang tinggi agar pembanguan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Peranan penerimaan dalam negeri sangat penting dan memiliki kedudukan yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang relatif besar dalam menjalankan pembangunan tersebut membuat pemerintah mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara yang bersifat stabil, yaitu berasal dari masyarakat itu sendiri ataupun relokasi dana yang berasal dari simpanan masyarakat.

Salah satu penerimaan negara yang dapat diandalkan dalam menunjang pembangunan adalah penerimaan dari sektor perpajakan. Pajak merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana suatu negara dapat membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. Atas Undang-Undang yang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi (imbalan).

U P T PERPUSTAKAAN

Adapun sistem pemungutan pajak yang diterapakan oleh Negara kita adalah *Self Assesment System* dimana wajib pajak diberikan wewenang dalam menghitung, memperhitungankan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Namun, *Self Assesment System* ini memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan wajib pajaknya sebagaimana mestinya akibat dari kesengajaan, kelalaian, ataupun ketidaktahuan dalam menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Di dalam *Self Assesment System* ini, pemerintah telah memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Namun, kepercayaan itu sebaiknya diimbangi dengan penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dari ketaatan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya baik dalam segi formal maupun dalam segi material.

Pada kenyataannya, mengharapkan masyarakat dengan sendirinya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sebagai suatu kepatuhan terhadap pemerintah, bukan merupakan hal yang mudah dan kesadaran itu sendiri masih sangat rendah di masyarakat Indonesia. Terlebih lagi ada anggapan bahwa pembayaran pajak itu sendiri sangat rentan akan terjadinya penyelewengan di dalam aparat pemerintahan itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak bukan hanya perlu melakukan sosialisasi yang menyeluruh guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi, melainkan harus melakukan hal-hal yang lebih signifikan. Kesadaran akan membayar pajak ini tentu akan meningkatkan penerimaan negara kedepannya.

Pertumbuhan penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir memang tidak dapat dikatakan stabil dan meningkat terus-menerus melainkan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Adakalanya pertumbuhan penerimaan pajak mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya, namun ada juga pertumbuhan yang mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik yang menunjukan pertumbuhan penerimaan pajak di Indonesia.

Sumber: http://bappenas.go.id

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2001-2011

Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan rencana penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1,032.57 triliun atau memberikan kontribusi sebesar 78,74% dari rencana penerimaan Negara tahun 2012 sebesar Rp 1.311,38 triliun. Untuk mengamankan rencana penerimaan perpajakan Tahun 2012 tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah-langkah strategis, yaitu :

a. Penyempurnaan sistem administrasi pajak Sektor Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu :

1) Mereview ulang kebijakan pemberian Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).

2) Penelitian ulang efektifitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) dimana PKP yang sudah tidak efektif lagi akan dicabut NPPKP nya.

3) Penyempurnaan sistem Teknologi Informasi yang berkaitan dengan Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-PM).

b. Pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan .

c. Pembinaan dan pemberian fasilitas perpajakan untuk sektor UMKM.

d. Peningkatan Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan dan Penyempurnaan Sistem Piutang Pajak Secara Online.

e. Pelaksanaan program Sensus Pajak Nasional yang lebih terencana, terarah, dan terukur.

f. Peningkatan kualitas SDM (AR, Pemeriksa Pajak dan Juru Sita).

g. Penyempurnaan sistem pengendalian internal melalui peningkatan fungsi kepatuhan internal, implementasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan Peningkatan Efektifitas Whistle Blowing System.

Selain langkah strategis yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak, peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan melalui program *canvassing* atau penyisiran. Program ini merupakan salah satu program yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak selain intensifikasi. Kalau selama ini pemerintah lebih banyak melakukan intensifikasi perpajakan, maka sudah saatnya melakukan ekstensifikasi perpajakan berupa penambahan Wajib Pajak dengan pemberian Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) sehingga pengenaan pajak akan lebih meluas dan beban pajak akan lebih tersebar dan merata. Intensifikasi perpajakan ini merupakan kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Usaha yang dapat digunakan untuk menambahkan penerimaan negara dari pajak dapat dilakukan dengan kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Kegiatan ekstensifikasi ini kemudian dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Dasar Peraturannya adalah :

1. **Per-16/PJ/2007** tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.
2. **Per-116/PJ/2007** tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah melalui Per-32/PJ/2008.
3. **Per-35/PJ/2008** tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pojok Wajib Pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi financial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan perkapita perorangan.

Dengan melihat fenomena tersebut, dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, sudah saatnya pemerintah melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak, walaupun peningkatan tersebut terkadang belum optimal dan tidak sesuai dengan target yang akan dicapai. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul "Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Kayu Agung".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kayu Agung?
2. Bagaimana pengaruh pertambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kayu Agung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kayu Agung.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertambahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Kayu Agung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

   Dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kayu Agung yang menjadi objek penelitian agar dapat melakukan pelayanan pajak yang terbaik pada saat wajib pajak melakukan pembayaran pajaknya guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Pengembangan Ilmu

   Diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan wawasan serta pemahaman dan perbandingan antara teori dan praktek yang sebenarnya mengenai pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan dapat sebagai bahan referensi serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai judul yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab kepustakaan. Penulisan disusun dengan sistematika berikut:

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menyajikan gambaran materi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai ekstensifikasi, wajib pajak, pajak penghasilan, dan kepatuhan wajib pajak, peneliti terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data, tehnik analisis data, dan data penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi.

BAB VI **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas dan menguraikan pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Kayu Agung.

BAB V **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan, saran-saran penulis, dan keterbatasan dalam penulisan skripsi.